



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

Yth. (Daftar terlampir)

**SURAT EDARAN
Nomor SE- 31 /PB/2018**

TENTANG

**BATAS MAKSIMUM PENCAIRAN DANA
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PADA DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TAHAP III TAHUN ANGGARAN 2018**

A. Umum

Dalam rangka pencairan dana yang berasal dari setoran terpusat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018 dan sehubungan dengan Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum a.n. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.1.KU.02.02-123 tanggal 10 April 2018 perihal Usulan Pencairan Penggunaan Penerimaan Tahun 2018 PNBP Pelayanan Jasa Hukum Tahap III, diperlukan petunjuk lebih lanjut mengenai Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PNBP pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun Anggaran 2018.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk pelaksanaan dalam rangka pencairan dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Ruang Lingkup

1. Penetapan Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Mekanisme pencairan Dana DIPA PNBP Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Dasar

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 723/KMK.02/2016 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *MF*

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-7/PB/2018 tanggal 5 Februari 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap I Tahun Anggaran 2018.
5. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-22/PB/2018 tanggal 21 Maret 2018 tentang Batas Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahap II Tahun Anggaran 2018.
6. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-2382/PB/2018 tanggal 12 Maret 2018 tentang Persetujuan Penundaan Terhadap Perhitungan Sisa Maksimum Pencairan (MP) PNBPN Tahun Anggaran Sebelumnya Pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia TA. 2018.

E. Ketentuan Pencairan Dana

Ketentuan pencairan dana DIPA PNBPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah sebagai berikut:

1. Batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sampai dengan Tahap III Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 221.667.192.313,- (dua ratus dua puluh satu miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga belas rupiah).
2. Perhitungan Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun anggaran 2018 pada angka 1 diatas terdiri atas :
 - a. Rp 56.432.318.625,- (lima puluh enam miliar empat ratus tiga puluh dua juta tiga ratus delapan belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) berdasarkan sisa Maksimum Pencairan dana PNBPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun anggaran sebelumnya. Sisa Maksimum Pencairan (MP) dana PNBPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun anggaran sebelumnya dimaksud akan diperhitungkan dengan PNBPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tahun anggaran berjalan.
 - b. Rp 57.170.644.181,- (lima puluh tujuh miliar seratus tujuh puluh juta enam ratus empat puluh empat ribu seratus delapan puluh satu rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sampai dengan bulan Januari 2018.
 - c. Rp 108.064.229.507,- (Seratus delapan miliar enam puluh empat juta dua ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) berdasarkan PNBPN tahun anggaran berjalan yang telah disetorkan ke Rekening Kas Negara sampai dengan bulan Maret 2018.
3. Berdasarkan pagu maksimum pencairan dana tersebut pada angka 1, maka batas Maksimum Pencairan Dana DIPA PNBPN Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Tahap III Tahun Anggaran 2018 masing-masing Satuan Kerja adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam proses penerbitan SP2D untuk pencairan DIPA PNBPN berkenaan, tidak perlu meminta bukti setor (SSBP lembar ke-4) kepada Satker bersangkutan dalam setiap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan.

F. Penutup

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Surat Edaran ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2018

DIREKTUR JENDERAL,





MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP. 19590606 198312 1 001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
5. Direktur Pelaksanaan Anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan
6. Direktur Pengelolaan Kas Negara Direktorat Jenderal Perbendaharaan
7. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
8. Direktur Sistem Perbendaharaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
9. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DAFTAR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA

1. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V
2. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I
3. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I
4. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
5. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II
6. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH
7. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I
8. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG
9. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU
10. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG
11. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI
12. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG
13. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG
14. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK
15. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA
16. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN
17. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA
18. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO
19. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU
20. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II
21. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI
22. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON
23. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR
24. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM
25. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG
26. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA
27. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU
28. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE
29. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG
30. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG
31. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO
32. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI
33. KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU 

Lampiran :

Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
 Nomor SE- 31 /PB/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Batas
 Maksimum Pencairan Dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
 Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Direktorat Jenderal
 Administrasi Hukum Umum di Lingkungan Kementerian Hukum dan
 Hak Asasi Manusia Tahap III Tahun Anggaran 2018

No	Kode Satker	Satuan Kerja/Instansi Pengguna	Kode KPPN	KPPN Pembayar	Pagu PNB	Blokir	Pagu Setelah Blokir	MP Sampai dengan Tahap II	MP Tahap III	MP Sampai dengan Tahap III
1	099297	BALAI HARTA PENINGGALAN JAKARTA	139	JAKARTA V	1.925.037.000	0	1.925.037.000	726.781.550	508.802.450	1.235.584.000
2	099298	BALAI HARTA PENINGGALAN SEMARANG	026	SEMARANG I	3.756.655.000	0	3.756.655.000	1.509.350.250	2.223.139.750	3.732.490.000
3	099299	BALAI HARTA PENINGGALAN SURABAYA	135	SURABAYA II	2.598.259.000	0	2.598.259.000	1.094.968.850	1.375.701.394	2.470.670.244
4	099300	BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN	004	M E D A N I	1.413.901.000	0	1.413.901.000	729.504.510	221.166.510	950.671.020
5	408432	BALAI HARTA PENINGGALAN UJUNG PANDANG	136	MAKASSAR II	1.624.615.000	0	1.624.615.000	529.737.250	231.149.750	760.887.000
6	408721	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	139	JAKARTA V	6.000.000.000	0	6.000.000.000	3.495.716.639	1.724.432.009	5.220.148.648
7	408730	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	022	BANDUNG I	6.000.000.000	0	6.000.000.000	3.174.290.000	630.970.000	3.805.260.000
8	408743	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	026	SEMARANG I	6.000.000.000	0	6.000.000.000	2.675.479.000	1.632.331.000	4.307.810.000
9	408753	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	135	SURABAYA II	6.000.000.000	0	6.000.000.000	4.957.875.000	377.806.000	5.335.681.000
10	408762	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	004	M E D A N I	6.000.000.000	0	6.000.000.000	2.506.983.000	1.505.362.000	4.012.345.000
11	408772	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	136	MAKASSAR II	4.000.000.000	0	4.000.000.000	1.356.505.000	1.112.871.000	2.469.376.000
12	408783	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	001	BANDA ACEH	2.600.000.000	0	2.600.000.000	1.920.846.000	90.382.000	2.011.228.000
13	408792	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	010	P A D A N G	4.000.000.000	0	4.000.000.000	2.936.325.000	-	2.936.325.000
14	408803	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	008	PEKANBARU	3.621.100.000	0	3.621.100.000	1.708.715.000	544.528.000	2.253.243.000
15	408812	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	014	PALEMBANG	2.600.000.000	0	2.600.000.000	1.722.725.000	43.328.000	1.766.053.000
16	408822	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	017	BANDAR LAMPUNG	3.861.000.000	0	3.861.000.000	2.274.859.000	443.740.000	2.718.599.000
17	408833	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	042	PONTIANAK	2.600.000.000	0	2.600.000.000	1.510.437.000	243.913.000	1.754.350.000
18	408842	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	045	BANJARMASIN	2.536.000.000	0	2.536.000.000	2.028.479.000	92.093.000	2.120.572.000
19	408852	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	046	SAMARINDA	4.000.000.000	0	4.000.000.000	2.676.992.000	630.549.000	3.307.541.000
20	408863	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	049	M A N A D O	2.600.000.000	0	2.600.000.000	1.443.545.000	472.475.000	1.916.020.000

No	Kode Satker	Satuan Kerja/Instansi Pengguna	Kode KPPN	KPPN Pembayar	Pagu PNPB	Blokir	Pagu Setelah Blokir	MP Sampai dengan Tahap II	MP Tahap III	MP Sampai dengan Tahap III
21	408873	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	037	DENPASAR	3.800.000.000	0	3.800.000.000	1.858.653.000	527.027.000	2.385.680.000
22	408882	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	039	KUPANG	2.434.607.000	0	2.434.607.000	1.107.391.050	417.033.950	1.524.425.000
23	408893	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	061	AMBON	2.600.000.000	0	2.600.000.000	1.711.273.000	344.121.000	2.055.394.000
24	408902	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	063	JAYAPURA	2.600.000.000	0	2.600.000.000	989.902.000	910.253.000	1.900.155.000
25	409160	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	012	JAMBI	2.430.000.000	0	2.430.000.000	2.100.219.000	-	2.100.219.000
26	409170	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	016	BENGKULU	2.360.000.000	0	2.360.000.000	1.805.542.000	41.985.500	1.847.527.500
27	409180	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	030	YOGYAKARTA	3.745.000.000	0	3.745.000.000	2.361.335.000	231.089.000	2.592.424.000
28	409191	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	043	PALANGKARAYA	2.600.000.000	0	2.600.000.000	1.241.083.000	417.781.000	1.658.864.000
29	409200	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	060	KENDARI	2.440.000.000	0	2.440.000.000	1.885.257.000	248.651.000	2.133.908.000
30	409211	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	051	PALU	2.520.000.000	0	2.520.000.000	1.300.062.000	443.064.000	1.743.126.000
31	409220	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	038	MATARAM	2.600.000.000	0	2.600.000.000	1.245.491.000	801.193.000	2.046.684.000
32	409257	DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM	139	JAKARTA V	501.372.104.000	1.649.388.000	499.722.716.000	41.444.115.457	86.232.557.444	127.676.672.901
33	648990	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	020	SERANG	6.000.000.000	0	6.000.000.000	3.769.694.000	652.551.000	4.422.245.000
34	649002	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA BELITUNG	015	PANGKAL PINANG	4.000.000.000	0	4.000.000.000	1.055.658.000	1.481.220.000	2.536.878.000
35	649011	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	050	GORONTALO	2.600.000.000	0	2.600.000.000	1.878.239.000	-	1.878.239.000
36	649023	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	062	TERNATE	2.600.000.000	0	2.600.000.000	1.593.521.000	-	1.593.521.000
37	667773	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	065	MANOKWARI	2.441.025.000	0	2.441.025.000	1.190.057.750	554.247.250	1.744.305.000
38	667782	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	009	TANJUNG PINANG	3.813.790.000	0	3.813.790.000	2.768.759.500	137.133.500	2.905.893.000
39	667793	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI BARAT	178	MAMUJU	2.600.000.000	0	2.600.000.000	1.316.596.000	519.582.000	1.836.178.000
TOTAL					629.293.093.000	1.649.388.000	627.643.705.000	113.602.962.806	108.064.229.507	221.667.192.313



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

DIREKTUR
JENDERAL

MARWANTO HARJOWIRYONO
NIP. 195106061983121001